

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Djatmiati, Tatiek, 2007, *Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik*, Universitas Airlangga, Surabaya.

B. Internet

- ANTARA : “Pj Walikota Yogyakarta Ajak Warga Gunakan Hak Suara”,
<https://www.antaranews.com/berita/3960039/pj-wali-kota-yogyakarta-ajak-warga-gunakan-hak-suara>, diakses pada 1 Maret 2024.
- BBC News Indonesia, “Pemilu 2024 : Tiga Pasangan Capres-Cawapres Akan Bertarung Dalam Pilpres, Apa Saja Visi dan Misi Mereka?”,
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-67376682>, diakses pada 1 Maret 2024.
- CNN Indonesia, “Kasus Suap Izin Apartemen, Eks Wali Kota Yogyakarta Diadili Pekan Depan”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221013133139-12-860061/kasus-suap-izin-apartemen-eks-wali-kota-yogya-diadili-pekan-depan>, diakses pada 28 September 2023.
- Dakhi, Suherti Yanus, “Pemilu Sebagai Tonggak Demokrasi”,
<https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2023/05/27/169883/pemilu-sebagai-tonggak-demokrasi/>, diakses pada 19 September 2023.

DIKPORA DIY, “Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta”,

<https://dikpora.jogjaprovo.go.id/web/read/sejarah-daerah-istimewa-yogyakarta>, diakses pada 1 Maret 2024.

Fisipol UGM, “Jelang Pemilu 2024, Gen Z Punya Peran Penting Wujudkan Masa Depan Politik Indonesia”,

<https://fisipol.ugm.ac.id/jelang-pemilu-2024-gen-z-punya-peran-penting-wujudkan-masa-depan-politik-indonesia/>, diakses pada 1 Maret 2024.

Fisipol UGM, “Ramai Diperbincangkan, Film “Dirty Vote” Ungkap Kecurangan Menjelang Pemilu 2024”,

<https://fisipol.ugm.ac.id/ramai-diperbincangkan-film-dirty-vote-ungkap-kecurangan-menjelang-pemilu-2024/>, diakses pada 1 Maret 2024.

Harian Jogja, “Dibidik KPK, Kasus Hotel Jl Gayam Jogja Ternyata Terkait

Perizinan Era Haryadi”,

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/09/26/510/1112961/dibidik-kpk-kasus-hotel-jl-gayam-jogja-ternyata-terkait-perizinan-era-haryadi>, diakses pada 31 Oktober 2023.

KemenPAN-RB, “Kepala BKN : Pejabat Kepala Daerah Dilarang Lakukan Mutasi Pegawai”,

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kepala-bkn-penjabat-kepala-daerah-dilarang-lakukan-mutasi-pegawai>, diakses pada 18 Januari 2024.

KPU RI, “Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta”,

<https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara/34/3471>, diakses pada 1 Maret 2024.

KPU RI, “Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, Provinsi Jawa Barat”, <https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara/34/3471>,

diakses pada 1 Maret 2024.

KPU RI, “Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat,”

<https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara/34/3471>, diakses pada 1 Maret 2024.

KPU RI, “Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, Provinsi Sumatera Utara”,

<https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara/34/3471>, diakses pada 1 Maret 2024.

Lumban Tobing, Charlie A., “Pengangkatan Pj Gubernur Beda Arah Politik Usai Jokowi-PDIP Pecah Kongsi”,
<https://forumkeadilan.com/2024/02/13/pengangkatan-pj-gubernur-beda-arah-politik-usai-jokowi-pdip-pecah-kongsi/>, diakses pada 1 Maret 2024.

Pemerintah Kota Yogyakarta : Profil Pimpinan Daerah,
<https://jogjakota.go.id/page/profil-pimpinan-daerah>, diakses pada 15 Januari 2023.

Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, “Singgih Raharjo Resmi Gantikan Sumadi sebagai PJ Walikota”,
<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/27366>, diakses pada 9 September 2023.

Rejogja, “Pj Wali Kota Yogyakarta Cermati Perizinan yang Dikeluarkan Pejabat Lama”,
<https://rejogja.republika.co.id/berita/rczx9y327/pj-wali-kota-yogyakarta-cermati-perizinan-yang-dikeluarkan-pejabat-lama>, diakses pada 28 September 2023.

Rejogja, “Disebut Serobot Tanah Negara, IMB Hotel Swiss-Belboutique Diminta Dicabut”,
<https://rejogja.republika.co.id/berita/rsmuzg291/disebut-serobot-tanah-negara-imb-hotel-swissbelboutique-diminta-dicabut>, diakses pada 1 November 2023.

Tugu Jogja News : “PJ Walikota Yogyakarta Pantau Pelaksanaan Pemilu 2024 di Berbagai TPS”,
<https://kumparan.com/tugujogja/pj-wali-kota-jogja-pantau-pelaksanaan-pemilu-2024-di-berbagai-tps-22AGIB3QFxr/full>, diakses pada 1 Maret 2024.

Yogyapos, “Sumadi SH MH, Pejabat Walikota Yogya 2022-2024”,
<https://www.yogyapos.com/berita-sumadi-sh-mh-pejabat-walikota-yogya-20222024-6968>, diakses pada 9 September 2023

C. Jurnal

Abustan, “Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum demokrasi, Sebuah Telaah Kritis”, Justicia Sains, volume 02, nomor 02, Desember 2017.

Aminah, dkk dalam Wardaniah, Rani, “Kritik Terhadap Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah di Indonesia” *Jurnal Dialektika Publik*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Andrews dalam Kristian, Indra, “Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia”, *Jurnal Dialektika*, Vol. 21, No. 2, 2023.

Aridhayandi, M. Rendi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 4, 2018.

Bihuku Salmon, “Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 1, Maret 2018.

Bintang Palaguna, Zulfikar, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Bisri dan Asmoro dalam Wardaniah, Rani, “Kritik Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia”, *Jurnal Dialektika Publik*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Cahyadi, dkk, “Mutasi : Bentuk Sanksi di Bidang Kepegawaian?”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Vol. 6, No. 1, Mei 2020.

Daulay, M. Rizki, “Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal” *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021.

Desrinelti, dkk, “Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2021.

Djadjuli, “Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.10, No. 1, 2007.

Elly, Cora, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2013.

Erest Mangindaan dalam Bintang Palaguna, Zulfikar, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Ernitasari, Yuli, “Analisis PJ. Kepala Daerah yang Memutasi Pegawai Negeri Sipil Tidak Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS Dalam Jabatan Struktural dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Lampung” *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10, Nomor 2, Juli 2016.

Grover H. S.. "...Of the people, by the people, for the people". *Journal of Indian Society of Periodontology*, Vol.24, No.3, Hal. 190, 2020.

Haeli, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus)”, *Jurnal Bestari*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020

Hanida, dkk, “Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal”, *Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6, No. 2, Desember 2020.

Iqbal, dkk, “Analisis Fenomena Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh Oleh Pemerintah Pusat” *Journal of Governance and Social Policy*, Vol. 4, No. 1, Juni 2023.

Junaidi V, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, volume 6, nomor 3, hlm. 132, 2009.

Karim, Quranul, “Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan”, *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 9, no. 2, Oktober 2018.

Muadi, dkk, “Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik” *Jurnal Review Politik*, Vol. 6, No. 2, Desember 2016

Mujahir, Edwar, “Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan”, *Jurnal Sinar Manajemen*, Vol. 5, No. 2, 2018.

- Nandya Putri, dkk, “Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah ‘ Provinsi Jawa Barat Tahun 2019”, *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022.
- Ni'mah Sulfiani, Andi, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 17, No. 1, 2021.
- Nubatonis, dkk, “Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Nugroho dalam Syafruddin, Hasanah Siti, “Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024”, *Journal of Government and Politics* (JGOP), volume, 4, nomor 2, Desember 2022.
- Raharja dan Dewi, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 15, No. 2, Juli 2013.
- Ramdhani dan Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik”, *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1, 2017
- Riedel Elim, “Tanggung Jawab Administrasi ASN Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Kewenangannya” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4, September 2018
- Rohman, dkk, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, *Jurnal Reformasi*, Vol.9, No. 2, 2019.
- Ruitan, Chalvin, dkk, “Proses Mutasi Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Kualitas Kerja (Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe)”, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Sasana, Hadi, “Kegagalan Pemerintah Dalam Pembangunan”, *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 1, No.1, Juli 2004.
- Siswanto dalam Wiranata Renndy, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Mutasi Karyawan Pada PT. Intan Hevea Industry Medan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi Graha Kirana*, Vol. 1, No. 1, Mei 2020.

Soares, dkk, “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, 2015.

Wahyu Didi, Sudirman, “Formulasi Aspek-aspek Pelayanan Publik Berkualitas”, *Jurnal Efisiensi*, Vol. 5, No. 1, Februari 2005

Wahyun M, Andik, “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia : Konsep, Fakta Empiris, dan Rekomendasi ke Depan” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2013.

Wardaniah, Rani, “Kritik Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia” *Jurnal Dialektika Publik*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Widyaningsih, Nikken Setyowati, “Relevansi Preferensi Penduduk Terhadap Fasilitas Kota yang Mempengaruhi Faktor Perkembangan Kota” *Plannit Journal*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2001.

Yulia, Neta, “Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik di Daerah Otonom Baru”, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2012.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa \ Yogyakarta (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5339).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898).

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota (Berita Negara RI Nomor 310 Tahun 2023).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

E. Lain-lain

Muhdi Gailea, Dicke, 2020, *Telaah Kritis Mengenai Tugas dan Kewenangan*

Sekretaris Daerah Selaku Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Bintang Prasajo, Staf Bidang Riset, Inovasi Pemerintah, dan Pengendalian Badan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta pada 19 Desember 2023.

Hasil Wawancara dengan Subarjilan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Balaikota Kota Yogyakarta pada 8 Desember 2023.

Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta 2021.

Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta 2022.

Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta 2023.